

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif, dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010
- Anna Trianingsih, Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi, Hukum Tata Negara Sejarah, Teori dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia, Depok, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2021
- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Jakarta, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Badan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Laut, Makna Negara Kepulauan, Badan Koordinasi Keamanan Laut, Jakarta, 2021
- DD Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, , Sebuah Sketsa: Refika Aditama 2003
- Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, UNY Press, Yogyakarta, 2011
- Fabriny Unus, Analisis Kebijakan Mengenai Keselamatan Nelayan dan Kapal Ikan Di Laut, Bogor, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, , 2004
- Faisal Akbar Nasution, Hukum Tata Negara, Medan, Sinar Grafika, 2023
- Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta. Kanisius, 1998
- Fyson, J. Design of Small Fishing Vessels. Farnham, England: Fishing News Books Ltd. 1985
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pelayaran dan Perairan Darat, Jakarta, Djambatan, 2000

- H.R Soebekti , Intisari Ilmu Pelayaran Datar, Sleman, Deepublish, 2015
- Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan, Malang, Setara Press, 2016
- Indradi Setianto, Kapal Perikanan, Semarang, UNDIP, 2007
- Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Pauluas Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994.
- M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
- M. Tahir Azhary, Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Prenada Kencana Media, Jakarta, 2003
- N.A.Soekarsono, Konstruksi Bangunan Kapal, Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Dharma Persada. Jakarta, 1995
- Nimatul Huda dan R Nazriyah, Teori dan Pengujian Peraturan perundang-undangan, Nusa Media, Bandung, 2011
- Nomura M. dan T. Yamazaki, Fishing Techniques L Japan. Japan International Cooperation Agency, 1977
- Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008
- O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan Ke-7, Jakarta: Kencana, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Kencana, 2007

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005
- Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005
- Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005
- Rachmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013
- Riana Pasaribu, Karakteristik Desain Kapal Perikanan Bottom Gillnet Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, Bangka Belitung, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2010
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Setianto, I, Kapal Perikanan, Semarang, Universitas Diponegoro, 2007
- SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1997
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2010
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. Aneka Cara Pembedaan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Sri Hayati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, Oemar Moechtar, Politik Hukum Pertanahan, Airlangga University Press, Surabaya, 2017

Stefani Juwanan, Aditya Salim, Gabriella GiaNova,dkk, Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Kelautan Dan Perikanan, Jakarta, Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020

Tim Penyusun Penyempurnaan Buku PIMTL 1972, Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut 1972, Semarang, 1985

Wiwik sri widiarty, Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta, Publika Global Media, 2024

Wartini Soegeng, Pendaftaran Kapal Indonesia, Bandung, Eresco, 1988

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran Dalam Hal Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Izin Berlayar

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan

C. Makalah/Karya Ilmiah/Jurnal

Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No. 2 (Juli, 2012)

Atamimi, A, Hamid S, „Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Jakarta, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990

Hari Utomo, “Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties In Ship Accident)”, Jurnal Legislasi Indonesia, 14 : 1, hlm. 62-64 (2017)

I Gusti Ngurah Kadek Hary Mahardi1 , Noveldesra Suhery, Penerapan Standar Laik Operasi (Slo) Pada Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Albacore, 6:3, (2022)

- Indah Dwi Jayanti, Analisis Pentingnya Status Hukum Kapal Guna Mewujudkan Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Semarang, Skripsi, Politeknik Ilmu Pelayaran, 2019
- Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004
- Muhammad Said Sitompul, “Harmonisasi Pengaturan Tentang Kewenangan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Spb) Kapal Ikan Di Pelabuhan Belawan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, Mercatoria, 9 : 2
- Nurul Febria, “Kelaiklautan Kapal Penumpang Dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus Pada Administrator Pelabuhan Kelas I Dumai Dan Kelas IV Bengkalis)”, Pekanbaru, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022
- Purbayanto, et al., Kajian Teknis Kemungkinan Pengalihan Pengaturan Perijinan dari GT menjadi volume Palka pada Kapal Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap - DKP dengan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FKPI-IPB, Bogor, 2004
- Septiono, Jamhur Poti, dan Ramadhani Setiawan, “Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan(Studi

Kasus Penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Di Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kijang)”, Studen Online Jurnal, 3:1

D. Internet/Media Online

Dewan Pertimbangan Presiden, Potensi Perikanan Indonesia, www.watimpres.go.id, Posting: 27 April 2017, diakses pada tanggal 29 November 2024 [http://repository.unimar-](http://repository.unimar-amni.ac.id/3824/2/14.%20BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf)

[amni.ac.id/3824/2/14.%20BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA .pdf](http://repository.unimar-amni.ac.id/3824/2/14.%20BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf),

diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

[https://hubla.dephub.go.id/ksopketapang/page/tugas-dan-](https://hubla.dephub.go.id/ksopketapang/page/tugas-dan-fungsi#:~:text=Kantor%20Kesyahb)

[fungsi#:~:text=Kantor%20Kesyahb](https://hubla.dephub.go.id/ksopketapang/page/tugas-dan-fungsi#:~:text=Kantor%20Kesyahb)

[andan%20dan%20Otoritas%20Pelabuhan%20mempunyai%20tugas%20m](https://hubla.dephub.go.id/ksopketapang/page/tugas-dan-fungsi#:~:text=Kantor%20Kesyahb)

[elaksanakan%20pengawasan%20dan.pelabuhan%20yang%20diusahakan%2](https://hubla.dephub.go.id/ksopketapang/page/tugas-dan-fungsi#:~:text=Kantor%20Kesyahb)

[0secara%20komersial.](https://hubla.dephub.go.id/ksopketapang/page/tugas-dan-fungsi#:~:text=Kantor%20Kesyahb), diakses pada tanggal 17 Oktober 2024

[https://lexikan.id/legal-analysis/pemerintah-menerbitkan-peraturan-](https://lexikan.id/legal-analysis/pemerintah-menerbitkan-peraturan-penyelenggaraan-bidang-pelayaran-pp-No31-2021/Pembaruan%20Kebijakan/208/?lang=id)

[penyelenggaraan-bidang-pelayaran-pp-No31-](https://lexikan.id/legal-analysis/pemerintah-menerbitkan-peraturan-penyelenggaraan-bidang-pelayaran-pp-No31-2021/Pembaruan%20Kebijakan/208/?lang=id)

[2021/Pembaruan%20Kebijakan/208/?lang=id](https://lexikan.id/legal-analysis/pemerintah-menerbitkan-peraturan-penyelenggaraan-bidang-pelayaran-pp-No31-2021/Pembaruan%20Kebijakan/208/?lang=id), diakses Tanggal 10 Januari

2025

[https://lexikan.id/news/ini-6-kelebihan-pp-27-2021-dari-menjaga-keberlanjutan-](https://lexikan.id/news/ini-6-kelebihan-pp-27-2021-dari-menjaga-keberlanjutan-hingga-jaminan-sosial-abk)

[hingga-jaminan-sosial-abk](https://lexikan.id/news/ini-6-kelebihan-pp-27-2021-dari-menjaga-keberlanjutan-hingga-jaminan-sosial-abk), diakses pada Tanggal 15 Januari 2025

[https://news.detik.com/kolom/d-5521785/potensi-perikanan-konsumsi-ikan-dan-](https://news.detik.com/kolom/d-5521785/potensi-perikanan-konsumsi-ikan-dan-kesejahteraan-nelayan)

[kesejahteraan-nelayan](https://news.detik.com/kolom/d-5521785/potensi-perikanan-konsumsi-ikan-dan-kesejahteraan-nelayan), diakses Tanggal 15 Agustus 2024

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Integrasi Data Maritim : Solusi Transportasi Laut Indonesia, <https://www.its.ac.id> diakses pada tanggal 28 November 2024

Kementerian Perhubungan, Tantangan Transportasi Laut Besar, Butuh Kolaborasi Kuat, <https://dephub.go.id> , Jakarta, 28 November 2024.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/27/181000565/ius-constitutum-dan-ius-constituendum-ini-pengertian-dan-perbedaannya?> Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022

